

JURNAL SOSIOLOGI AGAMA

Jurnal Ilmiah Sosiologi Agama dan Perubahan Sosial



DAMPAK GLOBALISASI DAN PERAN SOSOK KYAI DI SUMENEP
(Kajian Kritis Anthony Giddens pada Peran Kyai di Sumenep, Madura)
- A Zahid -

FAMAJAL (Potret Tradisi Pengakuan Kekerabatan Masyarakat
Kampung Lilinta Distrik Misool Barat Kabupaten Raja Ampat
Melalui Ritual Keagamaan)
- M. Syukri Nawir, dkk. -

TRANSFORMASI KONFLIK BERNUANSA
AGAMA DAN STRATEGI REFORMATIF PADA
PEMBANGUNAN BUDAYA DAMAI DI INDONESIA
- Ach. Aziz Faiz -

PROGRAM STUDI SOSIOLOGI AGAMA
FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM, UIN SUNAN KALIJAGA

JURNAL SOSIOLOGI AGAMA

Jurnal Ilmiah Sosiologi Agama dan Perubahan Sosial

Volume 14, Nomor 2, Juli - Desember 2020

Editor in Chief
Moh Soehadha

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta

Managing Editor
M Yaser Arafat

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta

Peer-Reviewers
Amin Abdullah

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta

Al Makin

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta

Abdul Mustaqim

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta

Alimatul Qibtiyah

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta

Hasan Sazali

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan

Zuly Qodir

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Soni Akhmad Nulhaqim

Universitas Padjajaran, Jawa Barat

Anif Fatma Chawa

Universitas Brawijaya, Malang

Muhammad Najib Azca

Universitas Gajah Mada, Yogyakarta

Jajang A Rohmana

Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati, Bandung

Editor

Nurus Sa'adah

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta

Inayah Rohmaniyah

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta

Muhammad Alfatih Suryadilaga

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta

Ahmad Izudin

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta

Wawan Sobari

Universitas Brawijaya, Malang

Pardamean Daulay

Universitas Terbuka, Surabaya

I Nyoman Ruja

Universitas Negeri Malang

Maulana S Kusumah

Universitas Jember, Jawa Timur

Erda Rindrasih

Utrecht University, Netherland

Fina Itriyati

Universitas Gajah Mada, Yogyakarta



Daftar isi

DAMPAK GLOBALISASI

DAN PERAN SOSOK KUYAI DI SUMENEP (Kajian Kritis Anthony Giddens pada Peran Kiyai di Sumenep, Madura)

A Zahid.....141

FAMAJAL (Potret Tradisi Pengakuan Keekerabatan Masyarakat Kampung Lilinta Distrik Misool Barat Kabupaten Raja Ampat Melalui Ritual Keagamaan)

M. Syukri Nawir, Muhamad Yusuf, Talabudin Umkabu,

M. Yasin. U.N. Mayalibit, Sulis Maryati159

TRANSFORMASI KONFLIK BERNUANSA AGAMA DAN STRATEGI REFORMATIF PADA PEMBANGUNAN BUDAYA DAMAI DI INDONESIA

Abd. Aziz Faiz179

PENGARUH SIKAP PROFAN TERHADAP PARADIGMA MASYARAKAT BERAGAMA PERSPEKTIF EMILE DURKHEIM

Nurul Khair197

JEMAAH MAHASISWA SALAFI DI MASJID POGUNG YOGYAKARTA

Arbi Mulya Sirait.....215

RELASI ELIT LOKAL DALAM KONFLIK KEAGAMAAN DI LOMBOK BARAT

Mohamad Baihaqi235

MODERASI RELASI LINTAS AGAMA TAU SAMAWA (ORANG SUMBAWA) BERBASIS KESEHARIAN DI TANA SUMBAWA

Yaspis Edgar N. Funay255

DERADIKALISASI KAUM REMAJA DALAM MEMBENDUNG RADIKALISME MEDIA SOSIAL

Mutrofin & Ahmad Kharis273

RELASI ELIT LOKAL DALAM KONFLIK KEAGAMAAN DI LOMBOK BARAT

Mohamad Baihaqi

UIN Sunan Kalijaga

Email: mohamadbaihaqi91@gmail.com



Abstrak

Dinamika elit politik yang berkontestasi dalam pemilihan lokal telah menciptakan potensi konflik secara vertikal. Kondisi ini telah menyebabkan adanya tidak kekerasan diantara kelompok keagamaan. Dalam berbagai kasus konflik yang ada, sentimental agama memang mudah untuk dijadikan faktor utama. Namun demikian banyak studi yang hanya menempatkan potensi konflik serta cara perdamaian. Tulisan ini mengkaji sebuah pola relasi yang dilakukan oleh elit politik lokal dalam keikutsertaannya pada kontestasi politik. Elit politik tersebut menciptakan isu sebagai alat utama yang menghasilkan kekerasan. Menggunakan pendekatan kualitatif serta di dukung dengan sumber data primer serta sekunder berasal dari hasil wawancara dan data kepustakaan. Penulis ingin melihat seberapa dalam pengaruh isu politik dalam menciptakan kekerasan pada Jamaah Ahmadiyah di Gegerung Lombok Barat. Dengan menggunakan analisa data kualitatif, penelitian ini memakai sudut pandang elit serta perilakunya. Namun demikian, pada saat bersamaan penelitian ini juga menemukan sudut pandang baru bahwa masyarakat dengan lokalitas yang masih tradisional mudah untuk di perdayai dengan membuat isu. Pada akhirnya, penelitian ini menemukan pentingnya kemampuan agama yang dimiliki oleh masyarakat ternyata berpengaruh untuk menangkal terjadinya kekerasan yang mengatasnamakan agama. Sehingga agama tidak mudah untuk dipolitisasi.

Kata Kunci : Elit Politik, Konflik, Kekerasan Agama

Abstract

The dynamics of the political elite that contestated in local elections have created the potential for conflict vertically. This condition has caused violence between religious groups. In the various cases of existing conflicts, sentimental religion is easy to become a major factor. But so many studies have only put the potential of conflict and the way of peace. This paper examines a pattern of relationships performed by the local political elite in its participation in political contestations. The political elite created the issue as the main means of generating violence. Using a qualitative approach and being

supported with primary and secondary data sources comes from interviews and library data. The author wants to see how in the influence of political issues in creating violence in the Ahmadiyah congregation in West Lombok's Gegerung. Using qualitative data analysis, the study used an elite point of view as well as its behaviour. However, at the same time the study also found a new point of view that people with traditional localities are easy to make with the issue. In the end, this study found the importance of religious ability that is owned by the community was influential to resist the occurrence of violence on behalf of religion. So religion is not easy to be politicized.

Keywords: Political elite, conflict, religious violence

PENDAHULUAN

Negara Indonesia merupakan negara dengan wilayah kepulauan terbesar dari Sabang sampe Merauke dimana 6000 pulau masih belum memiliki penghuni. Melihat potensi tersebut menjadikan keanekaragaman Indonesia begitu kompleks. Dimana terdapat multi etnis yang masing-masing memiliki agama serta kepercayaannya masing-masing. Oleh karena itu perbedaan yang ada membuat dasar ideologi Pancasila menjadi penguat segalanya (Andreas & dkk, 2012). Dalam memahami konteks keagamaan di Indonesia, berbagai macam gerakan sosial keagamaan lahir dan merdeka; Perserikatan Ulama (1911), Muhammadiyah (1912), al-Irsyad (1913), Persis (1920), dan Nahdlatul Ulama (1926). Sementara dari kalangan penganut Khatolik didirikan Madi Projo (1913) dan di kalangan penganut kristen dibentuk Perkumpulan Kristen (1920) (Zulkarnaen, 2002).

Melihat trend yang ada saat ini tentang konflik yang mengakibatkan adanya marginalitas dalam beberapa kelompok keagamaan memang menunjukkan bahwa Indonesia saat ini menjadi negara Intoleran. (LSI, 2012) Tindakan yang terjadi seperti di Madura pada kaum Syiah dan Lombok pada kaum Ahmadiyah. Saat ini dengan adanya intoleransi dalam kehidupan sosial masyarakat menyebabkan ketidaknyamanan dalam hidup berdanpingan. Karena akan timbul stereotipe dan pelabelan terhadap kelompok-kelompok keagamaan itu. Heterogenitas serta pluralitas etnis agama yang multikultur dalam suatu negara juga rawan menciptakan konflik.

Ahmadiyah bukanlah gerakan keagamaan baru di Indonesia. Bahkan sejak 1918, kabar mengenai Ahmadiyah sudah terdengar, sebelum akhirnya diperkenalkan secara langsung pada 1920 (Zulkarnaen, 2002). Sedangkan di Lombok, Jemaat Ahmadiyah diperkirakan masuk sejak 1957 dibawa oleh Jafar Ahmad setelah belajar di Surabaya (Nurhikmah, 2013). Perjalanan Ahmadiyah sebagai gerakan keagamaan mengalami dinamika di setiap zamannya. Perdebatan dan dialog mengenai gerakan ini sejak pra kemerdekaan sudah berlangsung. Meski belakangan, perdebatan dan dialog semacam itu nyaris ditutup. Hanya konflik dan kekerasan yang terus mengemuka.

Di Indonesia, konflik-konflik Ahmadiyah merebak dan peristiwa-peristiwa tersebut kerap kali diabaikan. Negara acapkali tak hadir dalam menjamin kebebasan beragama ketika kelompok mayoritas melakukan kekerasan terhadap minoritas. Kepolisian tak sepenuhnya mampu mengamankan kekerasan di berbagai tempat. Ketidakmampuan negara menjamin kehidupan beragama tentunya menimbulkan banyak reaksi protes. Kekuasaan yang ada tidak mampu melaksanakan kebijakan sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan.

Dalam sejarah konflik keagamaan yang ada menyebutkan bahwa Ahmadiyah mengalami marginalisasi bukan hanya dalam bentuk pelarangan tinggal dan mendiami wilayah. Perlakuan serta intimidasi kekerasan fisik juga di dapatkan. Seperti perusakan masjid Ahmadiyah di parung, Bogor. Sejumlah rumah warga yang dibakar serta masjid dirusak dan hingga puncaknya terjadi di Lombok Barat yang menyebabkan sebagian besar warga Ahmadiyah mengungsi namun tidak mendapatkan perlindungan. Kenyataan inilah yang sangat ironis bagi warga negara Indonesia.

Studi ini berupaya menjelaskan tentang dinamika kekuasaan elit lokal yang memiliki relasi di Lombok dalam keterkaitannya pada konflik keagamaan yang menyangkut Jamaah Ahmadiyah di Lombok Barat. Adanya pengaruh kekuasaan elit lokal sejatinya membantu memuluskan konflik ini terjadi. Dalam pemilihan pemimpin lokal / kontestasi lokal membuat beragam opini yang menyebutkan bahwa kelompok Ahmadiyah merupakan hal yang harus di jauhi sehingga sentiment agama dalam politik begitu. Sedangkan Vendley, menyebutkan bahwa konflik kekerasan bersinonim dengan konflik agama. Namun tentu layak untuk dipertanyakan ulang apakah agama benar-benar menjadi indikator utama atas munculnya konflik dan menguatnya intoleransi dalam relasi kemasyarakatan kita (Sulistiyati, 2017).

Dalam penjelasan yang lebih luas, penulis ingin menunjukkan bagaimana relasi kekuasaan bermain dalam konflik keagamaan. Mardian Sulistiyati dalam penelitiannya tentang Jamaah Ahmadiyah menjelaskan bahwa sentiment kelompok, pemisahan ruang, intervensi elit ini turut menyumbang segregasi konflik antara Jamaah Ahmadiyah dengan masyarakat (Sulistiyati, 2017). Aktor negara atau elit akan memungkinkan berpartisipasi dalam penganiayaan kelompok minoritas untuk memenangkan dukungan dari kelompok kekuasaan. Penulis membuat argumen melihat warga negara Ahmadiyah yang terbatas di Indonesia, yang telah mengalami tingkat diskriminasi yang tinggi di era demokrasi. Dalam bentuk mencari dukungan kekuasaan dimana elit mengandalkan broker individu dengan preferensi anti-Ahmadiyah untuk memenangkan jabatan politik, Ahmadiyah memiliki lebih banyak kesulitan dalam mengakses hak dan perlindungan yang diberikan oleh kewarganegaraan formal (Soedirgo, 2018).

Penjelasan yang lain menyebutkan bahwa Konflik Ahmadiyah di Indonesia sudah memasuki fase kritis. Dalam paradigma Conflict Political Emergence, konflik ini mengandung unsur-unsur seperti political origin, protracted duration, social cleavages, bahkan berujung pada predatory social formations. (Rahmat, 2019) Adanya praktek campur tangan pemerintah dalam definisi

agama yang diterima secara resmi telah meningkatkan kekerasan agama. Ini terjadi karena pemerintah memperlakukan para pengungsi Ahmadiyah yang begitu lama telah menjadi korban atau mayoritas diam dari konflik ini. Di Lombok khususnya para pengikut Ahmadiyah terpaksa meninggalkan rumah mereka yang hancur, Masjid dan sekolah untuk hidup sebagai pengungsi di tempat penampungan umum (Budiawati, 2009).

Berdasarkan fenomena yang ada pada dasarnya konflik keagamaan khususnya pada jamaah Ahmadiyah menunjukkan ketimpangan. Secara kelembagaan terjadi adanya perbedaan sosial terlebih melihat kasus di Lombok, banyak warga Ahmadiyah yang menjadi korban. Dalam studi yang lain di temukan pertama, peran negara Indonesia dalam konflik tidak didefinisikan hanya karena ketidakhadirannya tetapi juga oleh keterlibatan aktifnya; dan kedua, memahami munculnya ulama konservatif sebagai bagian dari proses peningkatan yang lebih luas dalam berbagai suara melemahkan klaim bahwa Indonesia menjadi lebih religius konservatif (Hicks, 2014).

Dalam instrumentalisasi konflik, sejumlah elit memiliki peran di tengah masyarakat untuk memainkan sentimen agama. Identitas digugat lalu dimanfaatkan untuk membangkitkan sentimen kelompok tertentu. Lewat strategi semacam itu, elit agama dan politik melakukan mobilisasi yang mensyaratkan perpaduan antara identitas kelompok dengan klaim-klaim tertentu terhadap salah satu kelompok minoritas. Mobilisasi massa kemudian menjadi sarana untuk memperoleh kekuasaan dengan modus mengamankan hak kelompok tertentu dan mengurangi kecemasan kelompok lainnya. Jacques dengan mengutip Horowitz menjelaskan bahwa kekuasaan memiliki dua pengertian yakni menegaskan status dan menghindari ancaman. Pengertian tersebut biasanya membutuhkan suatu upaya untuk mendominasi lingkungan, menekan perbedaan, serta mencegah dominasi dan tekanan dari pihak lain (Betrand, 2012).

Ketika kekhawatiran kelompok menjadi dasar bagi mobilisasi politik, perjuangan untuk mendapatkan kekuasaan menjadi satu-satunya tujuan. Mobilisasi mendorong dan mengambil bentuk lain sesuai dengan jejaring tokoh tertentu guna mengungkapkan dan membangun kepentingan-kepentingan pribadi dan klaim-klaim kelompok masyarakat. Ketakutan dan potensi kekerasan yang terbangun sebagai akibat dari sistem politik. Lebih jauh, terdapat beberapa faktor yang bagi R Tockary perlu diuji secara cermat yaitu komunalisme, nasionalisme berdasarkan etnis, penduduk asli, paradigma klaim kebenaran dalam kegiatan misionaris dan dakwah keagamaan (Tockary, 2003).

Sementara itu, Franz Magnis Suseno mengatakan, konflik etnis dan agama di Indonesia disebabkan oleh latar belakang yang kompleks. Salah satu faktor tersebut adalah akumulasi kebencian dalam masyarakat. Pelbagai stigma atas kelompok lain yang selama ini hanya bergulir sebagai hiddent transcript menguat pada momentum yang tepat (Suprpto, 2013). Kerapkali ketakutan kelompok, ketegangan, atau kekesalan-kekesalan bersifat terselubung, sementara

bentuk-bentuk tindakan politik paling umum tetap berada pada wilayah “transkip tersembunyi” (Betrand, 2012). Meski di permukaan tampak harmonis namun hal tersebut sebagai bagian yang menutup “transkip tersembunyi” tersebut dari kegembiraan, gerutu, kecurigaan dan kebencian yang terpendam dalam emosi-masing-masing individu.

Kebencian induvidu terus terakumulasi secara sosial sehingga melahirkan kebencian kolektif. Kebencian tersebut menjadi salah satu pemicu tindakan kekerasan masyarakat terhadap kelompok yang mereka anggap menyimpang dengan apa yang mereka pahami. Di samping selama ini, kekerasan etnis belum cukup menekankan kaitan-kaitan antara nasionalisme, lembaga, dan hubungan di antara kelompok-kelompok etnis (Betrand, 2012).

Studi mengenai relasi elit dalam konflik keagamaan merupakan studi lapangan yang menggunakan metode penelitian observasi yang disajikan secara analisi-deskriptif. Penggalan data dilakukan lewat observasi dan wawancara dengan berbagai aktor politik dan warga di Desa Gegerung dan Jemaat Ahmadiyah sendiri. Secara keseluruhan, sumber data studi ini berasal dari dua sumber, data primer dan data sekunder. Sumber data primer adalah keseluruhan data yang diperoleh berdasarkan kegiatan lapangan, berupa observasi dan kegiatan wawancara. Penggunaan wawancara dengan tidak terstruktur menjadi pertimbangan penulis. Selain itu penggalan data dari berbagai sumber dilakukan semenjak tahun 2018–2019 yang dilaksanakan di Asrama Transito Majeluk Mataram dan di Dusun Ketapang, Desa Gegerung, Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat. Selain itu sumber pustaka yang digunakan berasal dari sejumlah hasil penelitian sebelumnya baik dari buku maupun artikel di jurnal.

Penjelasan terkait konflik lebih terfokus pada faktor-faktor munculnya konflik komunal, peran kalangan elit politik, dan legitimasi kelompok. Dalam hal ini, konflik antara warga Ahmadiyah dan masyarakat Desa Gegerung Lombok Barat di permukaan tampak dipicu oleh hal-hal yang bersifat simplistis seperti sentimen dan kecurigaan warga Gegerung. Namun tanpa diperkuat oleh faktor-faktor sosial-politik yang melibatkan pimpinan formal dan non formal, gerakan massa tidak akan bergerak secara terstruktur dan massif. Para pemimpin dan elit politik menggunakan daya tarik emosional untuk menggerakkan dukungan massa dalam perebutan kekuasaan, sumber-sumber daya dan kepentingan pribadi. Baik dari level terbawah seperti di desa maupun pada level nasional. Karena itu kebanyakan ahli menolak argumen bahwa konflik muncul dari semangat identitas kelompok semata (Betrand, 2012). Lewat pendekatan semacam ini, peneliti dapat memusatkan perhatian pada peran elit dalam memobilisasi massa (Betrand, 2012).

HASIL DAN PEMBAHASAN

DESA

Gegerung merupakan salah satu desa yang terletak di kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Desa ini merupakan satu dari 10 desa yang berada di Kecamatan Lingsar. Desa Gegerung memiliki jumlah penduduk yang sebagian besar bersuku Sasak. Mayoritas bekerja sebagai petani dan penambang pasir. Desa Gegerung diketahui Memperoleh Surat Keputusan (SK) Pemekaran dari Pemerintah Kabupaten Lombok Barat-NTB pada 1998. Akhirnya Desa Gegerung secara administratif menjadi desa baru yang terpisah dari Desa Griya, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat. Pada saat itu, Maskum ditunjuk langsung oleh Bupati Lombok Barat sebagai Kepala Desa Gegerung dengan pertimbangan ia sudah mengabdikan diri sebagai Kepala Dusun sebelum Gegerung berstatus definitif sebagai desa baru di Lombok Barat. (Wawancara, 12 Juni 2019)

Desa Gegerung terdiri dari tujuh dusun antara lain Dusun Jalateng Barat, Dusun Ketapang, Dusun Orong Selatan, Dusun Orong Utara, Dusun Orong Puncak, Dusun Jelateng Timur, Dusun Jelateng Tengah. Pemukiman Jemaat Ahmadiyah terletak di Dusun Ketapang. Di sebelah utara berbatasan dengan sawah dan pemakaman. Sebelah timur berbatasan dengan areal tambang Galian pasir, sebelah selatan dibatasi sungai, dan di barat dibatasi bentang persawahan.

Setelah periode kepemimpinan H. Maskum selaku kepala desa berakhir, dimulailah pemilihan kepala desa secara demokratis. Pemilihan kepala desa pada 2001 berjalan lancar tanpa kendala apapun. Tak ada gejolak yang terlalu berarti di tengah masyarakat. Mengingat waktu itu Jemaat Ahmadiyah belum tinggal di desa tersebut. Pemilihan kepala desa pada 2001 dimenangkan oleh Maskum selaku petahana yang kembali terpilih sebagai Kepala Desa Gegerung periode 2001–2006.

Pada 2005, menjelang berakhirnya periode kepemimpinan Maskum, pemilihan kepala desa yang hendak dilaksanakan pada 2006 sudah mulai memanas. Pada waktu itu kontestan kepala desa mulai diseleksi. Muncul sebanyak tiga kontestan yang berlaga pada pemilihan yang akan dilaksanakan pada awal 2006. Kandidat calon kepala desa yang diloloskan salah satunya adalah petahana, H. Maskum. Dua calon lainnya adalah Sahudin dan Murad.

Saat itu, petahana secara hukum masih diperbolehkan mencalonkan diri sebagai kepala desa periode kedua. Setelah mengetahui Maskum kembali maju sebagai calon kepala desa, salah seorang pemuka agama kembali mencalonkan Sahudin, calon kepala desa yang dia usung pada lima tahun lalu. Ia juga turut terlibat secara langsung mengampanyekan Sahudin pada 2001. (Wawancara, 12 Juni 2019) Meski saat itu Sahudin kalah telak dari petahana. Sementara itu, dua tahun sebelum konflik meletus pada 2005, Jemaat Ahmadiyah sudah menempati rumah baru di Gegerung setelah mengalami pengusiran dari kampung halamannya di sejumlah kabupaten.

Jemaat Ahmadiyah berhasil membeli perumahan yang berada di sekitar Dusun Ketapang, Desa Gegerung. (Wawancara, 12 Juni 2019) Jemaat Ahmadiyah akhirnya tinggal di perumahan yang terpisah dengan warga Gegerung.

Mendengar kabar adanya pendatang baru di desa Gegerung, Kepala Desa Gegerung menerimanya secara terbuka. Awalnya warga Gegerung tidak memperlakukan kedatangan Jemaat Ahmadiyah. Hal ini dapat dilihat dari aktifnya warga Ahmadiyah dalam kegiatan-kegiatan sosial seperti gotong royong di masjid dan lingkungan sekitar. Jemaat Ahmadiyah pun merasa nyaman tinggal di pemukiman barunya di Desa Gegerung. Semenjak 2003 Jemaat Ahmadiyah menunaikan sholat Jumat di Masjid Dusun Ketapang bersama warga lainnya. (Wawancara, 16 Februari 2019) Namun ternyata kehangatan tersebut tak bertahan lama. Dua tahun Jemaat Ahmadiyah tinggal di desa tersebut ternyata tak sepenuhnya kondusif, mulai terdengar suara-suara lain dari Warga Gegerung yang menyebut Ahmadiyah sesat. (Wawancara, 13 Juni 2019)

Sebagai salah satu kandidat calon kepala desa, Sahudin kerap memantau aktivitas warga Ahmadiyah yang kebetulan di sebelah timur pemukiman Jemaat Ahmadiyah terdapat tambang pasir, tempat sebagian warga Gegerung bekerja. Asrama tempat Jemaat Ahmadiyah ditampung terletak di kelurahan Majeluk, Kota Mataram. Mereka hidup berdesak-desakkan dalam sebuah bangunan sempit bekas kantor transmigrasi. Namun setelah 15 tahun warga tinggal, secara bertahap beberapa warga Ahmadiyah berhasil menyewa dan membeli rumah di sekitar Kota Mataram. Penghuni di Asrama Transito juga menurun. Awalnya dihuni oleh 62 Kepala Keluarga (KK), kini mereka tinggal bersama 33 KK. (Wawancara, 14 Maret 2020)

Ketika pertama kali diungsikan, warga Ahmadiyah merasa kesulitan memertahankan hidupnya. Akhirnya beberapa warga menjual beberapa sisa aset berupa tanah di Lombok Timur. Hasil penjualan lahan tersebut, dibagikan secara merata kepada seluruh warga yang tinggal di asrama transito. Akan tetapi hasil penjualan tanah tersebut hanya bertahan beberapa bulan. (Wawancara, 14 Maret 2020)

MELIHAT KONFLIK AHMADIYAH DALAM ATURAN NEGARA

Banyak dari sebagian masyarakat kita yang memiliki anggapan bahwa Ahmadiyah ini merupakan sesat. Perilaku ini menunjukkan adanya bentuk intoleransi dalam beragama, berbangsa dan bernegara. Sesuai dengan amalan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjelaskan bahwa,

“Pasal 28E, Ayat 1. Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya. Ayat 2. Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya”

Dari bunyi pasal tersebut sangat jelas bahwa dalam kenteks Indonesia yang menjunjung tinggi dasar negaranya menunjukkan bahwa setiap warga negara berhak serta bebas memilih

agama dan kepercayaannya masing-masing. Seharusnya dalam demokrasi, isu-isu SARA, kemiskinan, pengangguran, buta huruf itu sudah selesai dalam pembahasannya. Kita lihat masih terdapat sisa-sisa budaya patrimonial dalam masyarakat, padahal sistem yang dianut adalah sistem demokrasi. Secara umum budaya patrimonial adalah antitesis dari demokrasi, budaya feodal, patriarkal, diskriminasi peran perempuan diruang publik, nepotisme, dinasti politik masih mengakar dalam kehidupan sehari-hari.

Oleh karena itu dengan menjunjung adanya aturan negara yang kuat serta pengamalan nilai-nilai Pancasila membuat pemerintah dapat melindungi segenap warga negaranya. Dimana dalam demokrasi Pancasila yang dapat mengakomodir kearifan lokal masyarakat dapat terbentuk melalui kebijakan.

Dalam kutipan yang berasal dari tulisan Hamdi & Smith (2012) menjelaskan bahwa konflik yang terjadi di tidak lepas adanya kompleksitas interaksi antar elit politik. Menurutnya, "Conflict in Indonesia has defined social reality in Ambon, Poso, West and Central Kalimantan, North and South Maluku, Papua, Aceh, East Timor and other regional areas. It is normatively contextualized by strained inter-ethnic, inter-religious relations and/or powerful abuses of state intervention within the complexity of the interplay between politics, economy, nationalism and cultural specificity".

Konflik Ahmadiyah dilombok menggambarkan bahwa daerah tersebut memang rawan konflik. Ketika elit politik sudah masuk dalam ranah agama. Banyak model kebijakan serta ketimpangan yang terjadi. Semua itu tidak lepas dari mobilisasi massa yang dilakukan elitlokal untuk melakukan diskriminasi terhadap masyarakat disana yang menjadi Jamaah Ahmadiyah.

Jamaah Ahmadiyah sebenarnya telah lama eksis di pulau Lombok, mereka berbaur menjadi satu bersama muslim-muslim lainnya. Tidak ada perbedaan yang mencolok di antara mereka, hubungan yang terjalin puluhan tahun, dari turun temurun tak ada masalah berarti yang ditimbulkan. Mereka hidup berdampingan, bekerja sama dengan nilai-nilai gotong-royong, urung rembuk membangun desa, dan lain sebagainya. Namun akhir-akhir ini, hubungan itu pun pecah menjadi konflik, diskriminasi, pengusiran, kekerasan yang tak masuk akal terhadap minoritas (Ahmadiyah), dimotori oleh oknum-oknum yang mempunyai kepentingan di balik itu (Sulistiyati, 2017).

Dalam setiap peristiwa yang menyebabkan konflik berkelanjutan, negara maupun kelompok sipil memiliki peran penting dalam upaya menyelesaikan konflik. Ini dilakukan atas dasar memberikan perlindungan bagi korban konflik serta menjelaskan nilai-nilai kemanusiaan. Oleh karena itu upaya hukum harus memberikan ruang perlindungan bukan menyebabkan terjadinya kekerasan secara terbuka.

POLITISASI AGAMA DAN KONFLIK SOSIAL

Tindakan kekerasan yang mengatasnamakan agama telah banyak memunculkan hipotesis, salah satunya di karenakan adanya rasa primordial yang tinggi, melainkan juga dipengaruhi oleh kepentingan politik. Bagaimanapun juga adanya tingkat keragaman etnis dan agama sudah menjadi pondasi bangsa. Namun semua yang terjadi tidak serta merta mengaburkan akan terjadinya konflik. Kekerasan pada jemaah Ahmadiyah Lombok Barat dan terjadinya perusakan gereja di Temanggung menunjukkan konflik agama begitu mudah. Ini terjadi karena peran serta negara tidak hadir dalam meredakan konflik. Padahal, dengan adanya langkah dialog bersama yang ditempuh oleh pemuka lintas agama memperkuat keyakinan publik.

Pada dasarnya kehadiran kelompok keagamaan dalam ranah sosial masyarakat di Indonesia bukan hanya kali ini saja. Adanya nilai-nilai agama yang masuk kedalam ranah politik menjadikan para pelakunya tidak dapat membedakan keduanya. Munculnya berbagai konflik sosial dan kekerasan yang lahir dari bentuk politisasi agama memang mengkhawatirkan. Ada yang menganggap bahwa konflik ini bisa lahir dari penafsiran ajaran teologis-normatif secara tidak teratur (Nasir, 2007).

Meletakkan agama dalam media politik tentu dapat mengakibatkan konflik sosial. Demikian ini terjadi karena agama merupakan ajaran yang selalu di dasarkan pada nilai kedamaian dan keselamatan. Sementara politik selalu berkaitan dengan kekerasan serta perebutan kekuasaan. Fakta lain menyebutkan bahwa agama menjadi pemicu konflik karena tindakan kekerasan (Handoko, 2006). Pemeluk agama menjadikan doktrin agama itu sebagai faktor utama. ini yang terjadi di dalam kompleksitas kasus Jamaah Ahmadiyah di Lombok Barat.

Menurut Weber agama merupakan fungsi dari adanya stratifikasi sosial sedangkan menurut Marx agama sebagai representasi dari kelas sosial. Oleh karena itu akan sangat mudah dipahami apabila perilaku elit memahami agama mengaitkannya pada materi politik akan menunjukkan kekuasaan elit tersebut. Akhirnya elit agama memiliki kemampuan atas pesan teologis normatif dari agama yang diyakini melainkan pada peran dan status sosial mereka (Latifah, 2018).

ELIT LOKAL SEBAGAI PENGUASA OPINI

Dalam lokalitas Lombok, praktek kekuasaan elit lokal memiliki dampak yang besar terhadap perubahan lingkungan sosial politiknya. Yang mendorong perilaku elit ini sebenarnya hanya terbatas permainan peran yang membentuk opini masyarakat terhadap kelompok Ahmadiyah. Elite lokal yang dominan ini adalah orang-orang yang memiliki kekuasaan dalam bidang agama atau elite yang memiliki basis politik kuat di daerahnya.

Menurut Mosca dan Pareto telah membagi tiga stratifikasi dalam bentuk kategori yaitu elit memerintah (*governing elite*), elit yang tidak memerintah (*non-governing elite*) dan massa diluar pemerintah (*non-elite*). (Jayadi Nas, 2007) Sejatinnya perilaku elit dalam kontestasi politik yang

ada hanya memetaan suara tidak bisa dilepaskan dengan budaya lokalnya. Semua itu dipengaruhi oleh elit lokal dan juga nasional, dalam tataran lokal, elit memiliki peran sebagai pendelegasi kekuasaan dalam wujud menaruh suara. Dalam tingkat nasional, elit memiliki peran sebagai penentu kebijakan jadi atau tidaknya elit menjabat (Pradana, 2019).

Pada titik inilah instrumentalisasi konflik yang digerakkan oleh aktor-aktor politik terjadi. Para pemimpin dan elit politik yang memainkan emosi masyarakat sekaligus mampu mendulang dukungan massa dalam perebutan kekuasaan, sumber-sumber daya dan kepentingan pribadi. (Suprpto, 2013) Baik dari level terbawah seperti di desa maupun pada level nasional. Bergabungnya kepentingan tokoh agama dengan salah satu calon Kepala Desa Gegerung untuk menumbangkan petahana menyebabkan isu keberadaan Ahmadiyah dimanfaatkan. Imbasnya, sentimen masyarakat tersulut dan kekerasan terjadi. Salah seorang Tuan Guru berhasil menekankan perbedaan antara Jemaat Ahmadiyah dengan warga setempat. Sedangkan salah satu kandidat kepala desa melakukan memobilisasi masa sebagai sarana untuk memperoleh kekuasaan yang dicitrakan untuk mengurangi kecemasan masyarakat Desa Gegerung.

Sebagai desa baru, Gegerung memiliki elit-elit baru yang bergerak secara politis. Para aktor politik cenderung memiliki kesempatan yang sangat luas dalam melakukan aktivitas maupun manuver politik (Zuhro, 2009a). Hal tersebut dapat dilihat dari peranan elit-elit politik desa yang lincah memainkan isu-isu perbedaan keyakinan sebagai komoditas untuk meraup simpati masyarakat. Afiliasi antara elit-elit desa sebetulnya sudah menjadi kecenderungan desentralisasi pasca orde baru.

Desentralisasi memberi warna lain dalam proses demokratisasi di Indonesia. Keragaman aktor politik ini juga terjadi di arena politik daerah di tingkat provinsi, kabupaten bahkan desa. Aktor-aktor politik di daerah berhasil memainkan perannya yang pragmatis dan dengan pelbagai siasat manipulatif sehingga dapat membelokkan tujuan desentralisasi dan demokrasi itu sendiri. Elit lokal yang mencalonkan menjadi Kepala Desa Gegerung sebagai kelompok elit-politik berperan memainkan identitas serta memanfaatkan sentimen masyarakat terhadap kelompok Ahmadiyah. Lewat kondisi tersebut elit politik melakukan mobilisasi massa yang mensyaratkan perpaduan antara kepentingan politik, identitas kelompok dan klaim-klaim “kesesatan” Ahmadiyah. Konflik dan kekerasan terjadi antar komunitas atau aliran dalam internal agama melibatkan aktor yang variatif.

Cornelis Lay membagi aktor tersebut menjadi empat macam. Pertama, ormas dalam komunitas agama yang sama. Kedua, Kekerasan yang melibatkan negara yang bertindak atas nama agama resmi dan merepresi aliran (yang dianggap) “menyimpang” dalam satu agama. Ketiga, Kekerasan yang melibatkan komunitas dari agama yang sama. Keempat, kekerasan yang melibatkan institusi pemegang otoritas agama atas warga dari komunitas yang sama (Lay, 2009).

Pola yang terakhir terjadi dalam kasus Ahmadiyah di Lombok Barat. Perbedaan pemahaman keagamaan sebagai saluran perjuangan politik salah satu oknum calon kepala desa. Tak ayal, perbedaan berubah menjadi kekacauan agar stabilitas desa terganggu sembari menyandarkan kelompok yang berbeda tersebut kepada pihak yang ingin dijatuhkan. Kalangan elit desa dan tuan guru berperan besar di tengah masyarakat.

Tokoh agama secara umum sudah lama dilihat sebagai pemicu konflik dan kekerasan terhadap Jemaat Ahmadiyah. Salah satunya Tuan Guru Amin Djamaluddin yang gencar melakukan serangan terhadap Ahmadiyah lewat pelbagai media salah satunya lewat buku “Ahmadiyah Membajak Al-Qur’an” yang didistribusikan oleh MUI NTB ke sejumlah pondok pesantren. Terlebih Amin aktif mengkampanyekan gerakan anti Ahmadiyah di Lombok (Nurhikmah, 2013).

Tuan Guru sebagai elit berhasil membangkitkan sentimen identitas dengan mengaskan perbedaan sedangkan di sisi lain ia memiliki kepentingan tertentu terhadap kuasa desa lewat kontestasi pemilihan Kepala Desa Gegerung. Demokrasi desa dimanfaatkan sebagai ajang untuk menunjukkan eksistensi elit di tengah masyarakat desa. Tuan Guru dan salah seorang kandidat kepala desa memegang wacana dan memberikan tekanan terhadap Jemaat Ahmadiyah agar keluar dari Desa Gegerung. Tipikalisasi Tuan Guru macam ini dalam konteks praksis kebebasan beragama di Lombok, lebih dominan memainkan peran sebagai penyalur wacana-wacana anti pluralisme yang berpotensi mencoreng cita-cita kebebasan dan citra keragaman antar sesama muslim (Umam, 2009).

Tuan Guru akhirnya menjadi aktor yang menjembatani disintegrasi antar sesama Muslim seperti apa yang dialami oleh Jemaat Ahmadiyah di Gegerung. Sementara itu, adanya fatwa MUI dan peraturan diskriminatif bupati Lombok Barat tidak berhubungan secara langsung dalam konflik dan kekerasan. Hal ini bertentangan dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang menyebut kekerasan bermuara pada fatwa MUI dan negara yang bersifat tendensius dan mendorong terjadinya kekerasan (Gaffar, 2013).

Faktor regulatif yang bersifat makro tersebut hanya sebagai legitimasi yang bersifat semu. Dalam kasus kekerasan di Desa Gegerung, tokoh agama, kandidat kepala desa dan warga setempat tak mengetahui adanya SK dari pemerintah daerah Kabupaten Lombok Barat yang melarang kehadiran Ahmadiyah. Juga tidak mengetahui fatwa MUI 1980 dan belakangan muncul Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri pada 2008 yang melarang dakwah Ahmadiyah. Adanya aturan ini yang merupakan Aturan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat tersebut berdasarkan SK Bupati Lombok Barat Nomer 35/2001. Kendati demikian, surat keputusan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat tersebut ditentang oleh Komnas HAM, Zumrotin yang menyatakan bahwa SK tersebut menunjukkan adanya kekacauan regulasi. SK tersebut dinilai bertentangan dengan konstitusi yang menjamin kebebasan beragama. Aturan tersebut dikeluarkan setelah pemda melakukan koordinasi dengan MUI dan Kementerian Agama Lombok Barat. Selain itu

terdapat fatwa kesesatan Ahmadiyah yang dikeluarkan oleh MUI.

Lemahnya pemahaman terkait regulasi menyebabkan tokoh agama dan masyarakat luas tak menghiraukan SK Pemda Lombok Barat maupun fatwa MUI. Sehingga di sini variabel politik sebetulnya lebih berkontribusi besar terhadap lahirnya konflik dan kekerasan terhadap Jemaat Ahmadiyah di Gegerung (Wahab & Fakhruddin, 2019).

DAKWAH PROVOKATIF DALAM KONTESTASI POLITIK

Akhir 2005 hubungan Jemaat Ahmadiyah dan warga Gegerung mulai memanas. Keretakan hubungan Jemaat Ahmadiyah dengan warga sekitar berawal dari pengajian yang diampu oleh salah satu tokoh agama di desa tersebut. Pengajian dilaksanakan secara rutin setiap Rabu dan Jumat sore di masjid Dusun Ketapang. Materi pengajian banyak menyinggung keberadaan dan menyesatkan Ahmadiyah. Provokasi lewat pengajian dianggap efektif karena mampu membangkitkan sentimen dan kebencian masyarakat terhadap Jemaat Ahmadiyah. (Wawancara, 12 Maret 2019)

Materi pengajian semacam itu mulai disampaikan beberapa bulan menjelang pemilihan kepala Desa Gegerung. Selain diisi oleh Tuan Guru dari desa setempat, juga mengundang penceramah lain dari Lombok Tengah. Mengingat Tuan Guru tersebut memiliki jamaah yang cukup banyak dari Desa Gegerung. Tak hanya itu, Tuan Guru di Desa Gegerung turun secara langsung dari dusun ke dusun untuk menyampaikan kesesatan ajaran Ahmadiyah dikatakan bahwa “

“(Alm) Tuan guru itu berkali-kali mengatakan bahwa aliran Ahmadiyah itu sesat dan wajib hukumnya diserang. Dia keliling dari dusun ke dusun menyebarkan informasi bahwa Ahmadiyah harus diusir dari desa ini. (Wawancara, 12 Juni 2019)

Provokasi dari pintu ke pintu dilakukan selama beberapa bulan. Hal ini diperkuat oleh laporan salah satu NGO di NTB yang menyebut salah seorang tokoh agama gencar melakukan agitasi. Namun ia tak mendalami latar belakang dan motif Tuan Guru tersebut. (LENSA NTB, 2018) Semakin mendekati pemilihan kepala desa, Tuan Guru yang berasal dari Gegerung itu semakin gencar menyebarkan provokasi. Dari situ, isu terhadap kehadiran Ahmadiyah semakin memanas. Akibatnya keharmonisan yang telah terbangun sejak kedatangan Jemaat Ahmadiyah pupus seketika. Warga sekitar Gegerung percaya bahwa ajaran Ahmadiyah sesat. Salah seorang warga menjelaskan bahwa informasi yang ia terima dari mulut ke mulut menyebut Jemaat Ahmadiyah menempatkan orang di luar Ahmadiyah seperti binatang yang najis. Setiap orang Gegerung yang berkunjung ke rumah Jemaat Ahmadiyah, bekas duduknya mesti disucikan. (Wawancara, 14 Maret 2020)

Informasi bohong semacam ini menyebar dan masyarakat Gegerung meyakini bahwa informasi tersebut benar adanya. Provokasi terkait menyimpangnya ajaran Jemaat Ahmadiyah

terus dilakukan terutama lewat pengajian. Kabarnya, Tuan Guru di desa tersebut merasa khawatir jamaahnya dipengaruhi oleh warga Ahmadiyah. Di samping di tingkat elit sudah lama MUI mengeluarkan fatwa yang menyesatkan Ahmadiyah. (Wawancara, 12 Juni 2019)

Kabar bohong tentang ajaran Jemaat Ahmadiyah di tengah sentimen masyarakat desa yang mudah terbakar, menyebabkan gelombang kebencian dan kekerasan meledak. Pada akhirnya pelaku ini belakangan diketahui bahwa pemuka agama tersebut berafiliasi dengan salah satu kandidat calon kepala desa. Selain memang tokoh agama tersebut sebelumnya tidak sejalan dan kerap berselisih secara lisan maupun fisik dengan kepala desa petahana. (Wawancara, 12 Juni 2019) Itu sebabnya pada pemilihan kepala desa Gegerung, pemuka agama mendukung Sahudin sebagai calon kepala desa. Calon petahana, Maskum menyeritakan hubungannya dengan salah satu tokoh agama semenjak lama sudah tidak harmonis, bahkan sejak Gegerung berstatus sebagai dusun. (Wawancara, 12 Juni 2019)

Tindakan elit lokal tersebut menunjukkan perilaku yang pragmatis. Perbedaan tuntutan serta perilaku politik dalam proses pertukaran sosial di masyarakat menyebabkan adanya distorsi informasi publik. Fakta sosial yang ada menjelaskan bahwa perilaku elit memiliki perbedaan kepentingan yang beragam dengan tuntutan rakyat. Pilihan politik elit tidak dapat disatukan, dipaksa dan diharuskan seragam. Posisi inilah yang sering membuat elit merasa tidak mendapatkan simpati pemilihnya. Ketika pemilih mengikuti logika yang penuh dengan informasi elit dan kemudahan mengakses platform media digital. Kesadaran politik akan terbentuk begitu saja. Media informasi menyederhanakan program demokratisasi sehingga persepsi aksesibilitas yang bebas di wujudkan dalam bentuk pertarungan konten politik di media. Fenomena ini bukan hanya tentang pertarungan konten politik, tetapi juga bagaimana membentuk pandangan masyarakat yang bentuknya hanya sebagai wacana (Pradana, 2020)

Dakwah provokatif yang digunakan oleh elit politik sejatinya merupakan konten yang digunakan sebagai bahan kampanye. Perilaku ini menunjukkan pragmatism politik sedang berjalan sebagai bentuk agenda tersembunyi untuk menjatuhkan lawan. Semua ini tidak lepas dari tindakan yang dilakukan oleh Tuan Guru dalam melakukan framing pada kelompok Ahmadiyah.

Elit politik yang lain bernama Sahudin mengakui salah seorang Tuan Guru dari Desa Gegerung dekat dengannya. Menurutnya, Tuan Guru aktif mendorong masyarakat untuk menjaga lingkungan. Itu sebabnya Tuan Guru tersebut menyatakan dukungan terhadapnya dan terlibat aktif dalam kampanye secara langsung maupun lewat pengajian-pengajian di masjid. (Wawancara, 13 Juni 2019) Sahudin sendiri menilai Ahmadiyah tidak diterima oleh masyarakat Gegerung karena ajarannya dianggap sesat dan menyimpang dari ajaran Islam. (Wawancara, 14 Juni 2019)

Sedangkan Maskum selaku petahana merasa dirinya sebagai korban. Sebab pada saat terjadi penyerangan pada akhir 2005 dan Februari 2006, rumahnya turut dikepung warga, dilempari

batu dan nyaris dibakar karena dianggap berpihak kepada Ahmadiyah. Ia berusaha menghalangi massa namun tak berhasil. (Wawancara, 12 Juni 2019) Maskum sebagai kepala desa Gegerung waktu itu bertanggungjawab penuh untuk mengendalikan warga. Bahkan sebelum penyerangan terjadi Maskum sempat berkunjung ke rumah warga Ahmadiyah untuk menginformasikan bahwa sejumlah massa dari Desa Gegerung dan Griya hendak menyerbu perumahan milik Jemaat Ahmadiyah. (Wawancara, 16 Februari 2019)

Alhasil, pada pemilihan kepala desa pada 2006, Maskum selaku petahana kalah. Sedangkan Sahudin, sebagai calon yang diusung Tuan Guru berhasil memperoleh suara terbanyak. Sahudin pun menjabat sebagai Kepala Desa Gegerung periode 2006-2010. Tak lama setelah itu, Tuan Guru yang mendukungnya ia tunjuk sebagai penghulu desa. Kepala desa baru lalu menyusun jadwal ceramah keliling bagi Tuan Guru ke tiap dusun di Desa Gegerung. (Wawancara, 14 Juni 2019)

Sementara itu, warga Ahmadiyah hingga saat ini tidak mengetahui persoalan di balik kekerasan yang menimpanya. Jemaat Ahmadiyah tak mengetahui secara pasti latar belakang penyerangan padahal sebelumnya mereka sudah beradaptasi dengan baik. Jemaat Ahmadiyah mengaku enggan mengetahui soal politik. Hal itu disebabkan karena Jemaat Ahmadiyah waktu itu sebagai pendatang baru dan merasa tak berhak mengetahui dinamika politik di desa tersebut. Warga Ahmadiyah pun tidak dilibatkan dalam pemilihan kepala desa. Posisi Jemaat Ahmadiyah relatif pasif dalam konteks politik sedangkan di tataran sosial ia terlibat aktif dalam kegiatan gotong royong. (Wawancara, 16 Februari 2019)

BUDAYA POLITIK DAN KEKERASAN DI DESA

Gabriel A. Almond dan Sidney Verba memandang budaya politik sebagai peran individu terhadap sistem dan komponen-komponennya, juga sikap individu terhadap peranan yang dimainkan dalam sistem politik. Budaya politik merupakan orientasi psikologis terhadap objek sosial dalam sistem politik. Sikap positif atau negatif seseorang terhadap sistem politik tergantung dari corak orientasi budaya politik yang digunakannya (Suprpto, 2013).

Budaya politik berkaitan erat dengan pandangan dan sikap individu dalam masyarakat sebagai sesama warga negara. Sikap atau pandangan ini berkaitan dengan rasa percaya diri serta permusuhan antara warga negara yang satu dengan warga negara yang lain atau antar golongan dalam masyarakat. Perasaan dan kecurigaan merupakan cerminan budaya politik tampak dalam pandangan dan sikap seseorang terhadap pengelompokan di sekitarnya. Dengan kata lain konflik antar kelompok atau golongan sosial merupakan ciri aktual yang dapat mewarnai budaya politik di dalam masyarakat.

Pada titik ini pemerintahan desa yang seharusnya menegaskan kesetaraan dan menghindari ancaman malah berlaku sebaliknya. Para kontestan nyatanya berupaya memunculkan perbedaan,

serta membiarkan dominasi dan tekanan dari pihak lain. Kehadiran Jemaat Ahmadiyah menjadi dasar mobilisasi politik dan perjuangan untuk mendapatkan kekuasaan sebagai satu-satunya tujuan. Mobilisasi tersebut juga mendorong dan mengambil bentuk lain sesuai dengan jejaring tokoh tertentu guna mengungkapkan dan membangun kepentingan-kepentingan pribadi.

Meski pemilihan kepala desa di Gegerung dilaksanakan secara demokratis, namun pada kenyataannya tindakan para kontestan menyidrai demokrasi sendiri. Salah satu hal yang merusak demokrasi menurut Robert A. Dahl adalah memaksa pemilih dengan motif dan unsur-unsur kekerasan terhadap pihak lain. Padahal dalam demokrasi, setiap masyarakat bebas mengespresikan diri (Abdillah, 2003). Kekerasan-kekerasan terjadi dalam rentan waktu yang cukup panjang dan melibatkan pelbagai pihak. Tidak hanya warga setempat, tetapi juga peran tokoh agama dan instrumen-instrumen pemerintahan di tingkat kabupaten. (Wawancara, 14 Maret 2020)

Itu artinya, perkembangan budaya politik suatu masyarakat dipengaruhi oleh kompleksitas nilai yang terdapat dalam masyarakat itu sendiri. Kehidupan masyarakat dipenuhi oleh orientasi antar nilai yang memungkinkan timbulnya kontak-kontak di antara budaya politik suatu kelompok atau golongan disebut sebagai subbudaya politik, yang pada dasarnya merupakan proses terjadinya pengembangan budaya. Di Gegerung, struktur budaya demokratis sebagai desa baru belum terbentuk sehingga kontestasi politik tidak stabil. Keserasian antara struktur budaya dan struktur politik menunjukkan tingkat keserasian budaya politik masyarakat (Zuhro, 2009b).

Sementara itu, kebebasan beragama secara regulatif, tak sepenuhnya mampu menjamin kebebasan beragama di tingkat terbawah karena terdapat kompleksitas persoalan lokal yang lebih potensial. Dalam kasus Ahmadiyah di Lombok Barat, persoalan politik desa yang relatif tidak stabil menjadi pemicu terhambatnya kebebasan beragama dan berkeyakinan. Politik desa yang dilaksanakan secara demokratis-prosedural malah berdampak negatif terhadap kehadiran minoritas dan kebebasan beragama.

Mengingat kebebasan beragama secara universal dijamin lewat pelbagai prinsip-prinsip dasar namun kebebasan beragama bukanlah nilai yang otonom dan berdiri sendiri. Kebebasan beragama terkait dengan nilai-nilai yang berhubungan dengan hak dan kewajiban yang menyangkut sejumlah pihak instansi seperti negara, kelompok dan individu serta kepentingan kekuasaan (Taher, 2009: 314).

Salah satunya kekuasaan di level terbawah seperti di desa. Di satu sisi intoleransi politik terhadap Jemaat Ahmadiyah terjadi karena adanya pengkategorian berdasarkan standar-standar keagamaan tertentu, serta pendidikan, kontak atau hubungan kelompok masyarakat juga mempengaruhi. Hubungan antara tokoh agama dan elit politik desa sebagai unsur kuat yang mempengaruhi intoleransi politik di Desa Gegerung. Otoritas tokoh agama yang kuat di tengah masyarakat mempermudah mobilisasi massa dan akibat sentimen anti Ahmadiyah. Kekerasan berbasis doktrin agama dan aliran tertentu menyimpan kandungan legitimasi teologis yang

tak mudah didialogkan. Fenomena kekerasan jenis ini memiliki jalinan dan keterkaitan entitas dengan pelbagai macam faktor lain seperti politik dan ekonomi (Hasan & Mursalin, 2011).

Namun karena berbagai kasus kekerasan kerap dilihat secara simplistik akhirnya konflik atas nama agama dinilai disebabkan semata oleh persoalan perbedaan keyakinan, regulasi pemerintah dan pengaruh identitas masyarakat. Padahal di balik itu terdapat variabel yang kerap tersembunyi. Pada titik itulah Jemaat Ahmadiyah berada dalam lingkaran kekerasan. Simbol-simbol keagamaan menjadi semacam representasi sosial yang bertaut erat dengan sifat komunal masyarakat. Lewat simbol agama tersebut komunalitas sosial terjalin kuat. Ketika simbol ini dinilai dilecehkan maka kekerasan yang kerap terjadi di Indonesia ditengarai sebagai pemicu utamanya (Hasan & Mursalin, 2011). Begitu halnya di Desa Gegerung, masyarakat memiliki ikatan persaudaraan dan emosional yang kuat sehingga begitu identitas keagamaannya diusik akan dengan sangat mudah berubah menjadi energi negatif. Terutama dalam bentuk kekerasan terhadap Jemaat Ahmadiyah.

Sedangkan selama terjadi kekerasan, Jemaat Ahmadiyah di Gegerung tak melakukan perlawanan. Mereka memilih lari keluar dari desa. Begitu situasi mencekam, semua rumah dirusak dan dibakar Jemaat Ahmadiyah terpaksa melarikan diri lewat sawah sebelah selatan Desa Gegerung, menyeberangi sungai dekat desa Griya. (Wawancara, 16 Februari 2019) Dalam beberapa kasus kekerasan terhadap Ahmadiyah, tidak pernah terjadi benturan fisik secara langsung karena Jemaat Ahmadiyah memilih berlaku pasif. Mereka memilih bertahan tanpa perlawanan atas kekerasan warga yang terjadi (Gaffar, 2013).

KESIMPULAN

Kekerasan dengan mengatasnamakan agama, meskipun memiliki legitimasi theologis, sesungguhnya dapat dipahami dengan memiliki keterkaitan dengan model entitas lain yakni politik. Namun karena kebebasan ekspresi yang salah menyebabkan tindak kekerasan dan kesewenangan banyak terjadi. Ini karena motif-motif yang di dasari oleh nilai agama yang tidak dalam ruang yang seharusnya. Persoalan lain telah menyebabkan tindak kekerasan erat kaitannya dengan simbol-simbol agama. Disaat agama menjadi identitas dan ideologi, dapat mudah terbakar emosi apabila simbol itu dilecehkan dan di hujat oleh orang lain. Berbeda ketika agama di alienasi dan tereliminasi dari kancah modernitas, identitas agama akan selalu dibangkitkan menjadi ideologi alternatif yang mampu menghadirkan nuansa baru dalam kehidupan modern.

Praktek elit politik lokal yang bermain dalam dinamika kontestasi politik saat pemilihan memberikan dampak yang besar terhadap situasi keagamaan di Lombok Barat. Konflik Ahmadiyah di Gegerung menjadi aktual salah satunya karena adanya instrumentasi yang dimainkan oleh aktor politik dalam suksesi pemilihan umum baik di tingkat desa, kabupaten, provinsi maupun dalam skala nasional. Hal tersebut menjadi salah satu aspek yang menjelaskan keterkaitan antara akumulasi kebencian kelompok masyarakat dengan dorongan untuk bertindak vandal terhadap kelompok lain

Pola konflik dan kekerasan terhadap Ahmadiyah memang kompleks. Di balik kompleksitas tersebut, terdapat pemicu yakni keterlibatan para aktor politik dalam proses mobilisasi massa. Politik desa yang berada dalam unit terbawah dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Aktor-aktor politik selain punya modal finansial juga menguasai wacana publik. Para jemaat Ahmadiyah yang notabene sebagai pendatang baru di tempat tersebut tidak mengetahui agenda apa di balik penyerangan warga Gegerung. Padahal sebelumnya interaksi dan komunikasi antara Ahmadiyah dan warga sekitar berlangsung hangat.

Kehadiran kelompok Ahmadiyah di Desa Gegerung dimanfaatkan oleh elit politik desa untuk meraup suaranya. Salah satu strategi yang digunakan adalah dengan memanfaatkan keberadaan tokoh agama di desa tersebut. Salah satu kontestan calon kepala desa memiliki kepentingan untuk menumbangkan petahana dan kepentingan tersebut setali dengan keinginan tokoh agama. Perbedaannya, calon kepala desa bertujuan menjadi orang nomor satu di desa sedangkan tokoh agama memiliki motif personal dengan petahana. Bertemunya kepentingan untuk menumbangkan petahana yang memiliki kekuatan politik menyebabkan arus mobilisasi massa menyandarkan seluruh persoalan kepada petahana.

Hal ini menunjukkan bahwa penelitian yang menghubungkan antara konflik dan kekerasan terhadap Ahmadiyah di Desa Gegerung Lombok Barat dengan keputusan SKB Tiga Menteri dan SK Bupati tidak sepenuhnya mempengaruhi konflik Ahmadiyah di Lombok Barat. Aturan yang dinilai menyudutkan kelompok Ahmadiyah tersebut tak sepenuhnya diketahui oleh tokoh agama dan tokoh masyarakat di Desa Gegerung. Politik pada level makro tidak secara langsung menyentuh watak dan perilaku masyarakat. Sedangkan di level mikro, aktor-aktor desa bergerak secara langsung memobilisasi masyarakat untuk mengusir Jemaat Ahmadiyah.



Bibliografi

- Abdillah, M. (2003). *Konflik Komunal di Indonesia*. Jakarta: Inis.
- Andreas, & dkk. (2012). *Kekuatan Pembebas*. Yogyakarta: Kanisius.
- Betrand, J. (2012). *Nasionalisme dan Konflik Etnis Cina di Indonesia*. Yogyakarta: Ombak.
- Budiawati, E. (2009). "Pluralism Collapses: A Study of the Jama'ah Ahmadiyah Indonesia and its Persecution". *Asia Research Institute*, 117, 1–26. <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.1645144>
- Gaffar, A. (2013). "Jemaah Ahmadiyah Indonesia (JAI) dalam Perspektif Kekerasan Negara: Dua Kasus dari Surabaya Jawa Timur dan Lombok NTB". *Jurnal Sosiologi Islam*, 3(2), 29–50.
- Hamdi, S., & Smith, B. (2012). "Sisters, militias and Islam in conflict: Questioning "reconciliation" in Nahdlatul Wathan, Lombok, Indonesia". *Contemporary Islam*, 6. <https://doi.org/10.1007/s11562-011-0168-5>
- Handoko, I. P. (2006). "Upaya Menjadikan Dunia Lebih Indah". Rabu, 15 Februari 2006. *Kompas*.
- Hasan, B., & Mursalin, A. (2011). "Konflik Komunal Mengatasnamakan Agama di Indonesia: Analisis terhadap Konflik Ahmadiyah dalam Pemberitaan Media 2005–2011". *Jurnal Kontekstualita*, 26(1), 71–115.
- Hicks, J. (2014). "Hersey and Authority: Understanding the Turn Against Ahmadiyah in Indonesia". *South East Asia Research*, 22(3), 321–339. <https://doi.org/10.5367/sear.2014.0216>
- Latifah, N. (2018). "Agama, Konflik Sosial dan Kekerasan Politik. *FONDATIA*", 2(2), 154–167. <https://doi.org/10.36088/fondata.v2i2.131>
- Lay, C. (2009). "Kekerasan atas Nama Agama: Perspektif Politik". *Jurnal Ilmu Sosial Dan Politik*, 13(1), 1–19. <https://doi.org/10.22146/jsp.10964>
- Nasir, H. (2007). *Resolusi Konflik Islam di Indonesia*. LkiS.
- Nurhikmah. (2013). *Satu Dekade Jadi Rumpun Terasing: Narasi Identitas dan Kekerasan JAI di Lombok*. Yogyakarta: Universitas Sanata Darma.
- Pradana, M. Y. A. (2019). "Relasi Sosial Elit Politik dan Sesepuh Desa Melalui Langgar di Kabupaten Malang". *Jurnal Sosiologi Agama*, Vol. 13, No. 1.
- Pradana, M. Y. A. (2020). "Elite Rationality, Traditions and Pragmatic Politicians". *JPPol*, 1, 20.
- Soedirgo, J. (2018). "Informal Networks and Religious Intolerance: How Clientelism Incentivizes The Discrimination of The Ahmadiyah in Indonesia." *Citizenship Studies*, 22(2), 191–207. <https://doi.org/10.1080/13621025.2018.1445490>

- Sulistiyati, M. (2017). "The Dynamics of Socialreligious Relationship between Indonesian Ahmadiyya Community and Non-Ahmadiyya Community". *Jurnal Masyarakat & Budaya*, 19(1).
- Suprpto. (2013). *Semberak Dupa di Pulau Seribu Satu Masjid*. Jakarta: Penerbit Kencana.
- Taher, E. P. (2009). *Merayakan Kebebasan Beragama: Bunga Rampai 70 Tahun Djohan Effendi*. Jakarta: Penerbit Kompas.
- Tockary, R. (2003). Catatan Singkat tentang Etnis Agama di Indonesia. In *Konflik Komunal di Indonesia Saat Ini*. Pusat Bahasa dan Budaya UIN Syarif Hidayatullah.
- Umam, F. (2009). "Tera Ulang Peran Profetik Tuan Guru dalam Konteks Kebebasan Beragama di Pulau Lombok". *Jurnal Ulumuna*, XIII(2), 433–466.
- Wahab, A. J., & Fakhrudin. (2019). "Menakar Efektivitas SKB tentang Ahmadiyah dan Faktor Penyebabnya: Studi Kasus Konflik Ahmadiyah di Desa Gereneng Lombok Timur". *Jurnal Harmoni*, 17(2), 443–459.
- Zuhro, R. S. (2009a). *Demokrasi Lokal: Peran Aktor dalam Demokratisasi*. Yogyakarta: Ombak.
- Zuhro, R. S. (2009b). *Demokrasi Lokal: Perubahan dan Kesenambungan Nilai-nilai Budaya Politik Lokal di Jawa Timur, Sumatera Barat, Sulawesi Selatan dan Bali*. Yogyakarta: Ombak.
- Zulkarnaen, I. (2002). *Gerakan Ahmadiyah*. Yogyakarta: LkiS.

Wawancara

H. Maskum, Kepala Desa Gegerung Periode 2001–2006

Jauzi, Jemaat Ahmadiyah Lombok

Sahudin, Kepala Desa Gegerung Periode 2006–2011

Ahmad Saleh, Jemaat Ahmadiyah Lombok

Marzuki, Warga Dusun Ketapang, Desa Gegerung, Lombok Barat



JURNAL SOSIOLOGI AGAMA

Jurnal Ilmiah Sosiologi Agama dan Perubahan Sosial

Program Studi Sosiologi Agama, Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta

